



nasional) telah menjadi kunci yang berlatang belakang pembentukan kelompok-kelompok kawasan ekonomi. Hanya saja pembentukannya kemudian timbul sesuatu pertanyaan. Bukankah untuk mencapai suatu sasaran efisiensi ini, akan muncul korban- korban? Jangan-jangan hanya negara-negara tertentu saja yang mendapat keuntungan dalam menarik manfaat dengan menjadi yang efisien. Sementara sebagian dari negara lain mengalami kegagalan dan malah rugi?

Disisi lain kita harus memandang akan potensi yang besar terhadap kelompok-kelompok negara-negara yang tergabung dalam komitmen perdagangan seperti apa yang dikatakan oleh **Gerald M. Meier (1989)**, integrasi ekonomi di kawasan tertentu akan menghasilkan manfaat pokok. *Pertama*, menstimulasikan eksistensi dan ekspansi industri manufaktur dengan basis yang lebih rasional. *Kedua*, meningkatkan manfaatperdagangan (Gain from Trade), yang bisa pula diartikan sebagai perbaikan dasar tukar (terms of Trade) pada kelompok-kelompok tersebut. *Ketiga*, menimbulkan persaingan yang semakin intensif, sehingga menaikkan tingkat efisiensi. (A. Tony Prase-tiantono, 1995: 346)

Pro kontra mengenai keberadaan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) yang kita cermati melalui media massa, sejauh ini memang tanpa didasarkan pada asumsi,

bahwa keberadaan APEC akan diarahkan menjadi sebuah kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Hal ini akan dilakukan bertahap, melalui tahun 2000 nanti. (Jawa Pos, edisi Rabu, 1995). Sebenarnya tidak ada yang salah dengan free trade area. Dengan batas-batas tertentu pol regionalisasi ekonomi (*economic regionalism*) atau intergrasi ekonomi regional (*regional economic intergration*) semacam ini perlu dan layak dilakukan, karena memberi keuntungan, untuk itu sejarah mencatat muncul blok-blok perdagangan seperti yang disebutkan di atas yaitu: AFTA (*Asean Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), Uni Eropa (*Wuropean Union*). (Jawa Pos, edisi selasa: 1995)

Keterlibatan Indonesia dalam APEC (*Asia Pasific Ekonomic Coorporation*) dan pilihan sikap meratifikasi GATT (*General Agreement of Tarif and Trade*) adalah seharusnya didudukkan pada persoalan pemerataan dan kemakmuran rakyat. (Surya, Senin: 1995). Sejauh ini keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan pasar bebas tersebut telah banyak melahirkan pendapat pro-kontra dari kalangan pengamat, persoalan APEC sama sekali tidak murni persoalan ekonomi. Dari kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan tampak bahwa penyelewengan APEC adalah satu persoalan yang terkait persoalan politik.

Ini terlihat dari negara-negara yang terlibat APEC mempunyai potensi ekonomi (politik) yang variatif seperti Amerika dan Jepang, serta negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan Philipina. Perpaduan keanggotaan ini tak ayal mengkondisikan persaingan ekonomi antara negara maju yang notabene kuat (secara politik atau ekonomi).

Strobe Talbot, kolumnis Time, menggambarkan bahwa pertikaian ekonomi itu diwarnai antara kubu proteksionisme dan liberal. "Pertikaian itu tak kalah sengitnya dengan konflik antara kapitalisme dan komunisme. Hal ini tampak sekali bertele-telenya pertemuan putaran Uruguay (*Urugay Round*) dan GATT, (Amir R. Sophian, 1997). Dilain pihak kelompok-kelompok negara-negara berkembang terkesan defensif. Fenomena serupa terkesan di kawasan Asia Tenggara, AFTA dan APEC di wilayah Asia Pasifik telah merumuskan langkah-langkah yang antisipatif dan profesif. Sementara empat macan Asia (Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong) makin meluasnya pengaruhnya ke negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Pertanyaan kini adalah, bagaimana mungkin semua itu dapat terwujud? secara makro kita mengetahui bahwa negara-negara tersebut tidak memiliki strategi pembangunan yang benar-benar didasarkan pada prinsip















